

BAB I PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Kebijaksanaan Deperindag RI dalam Merespon Persetujuan Persetujuan Asean Free Trade Area (AFTA)”. Judul tersebut dipilih dan diangkat oleh penulis berdasarkan beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan dalam pemilihan judul tersebut antara lain :

1. Dunia dewasa ini ditandai dengan adanya era globalisasi dan regionalisasi, dua kepentingan dan kenyataan yang berbeda sekaligus tidak bisa terelakkan. Dengan adanya suatu tujuan dari suatu negara tertentu maka akan memperkuat *bargaining position* dalam menghadapi raksasa regionalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi sendiri adalah tidak ada satu negara atau kelompok negara yang dapat lepas dari perkembangan menuju saling ketergantungan ekonomi yang semakin besar. Sedang regionalisasi dalam pengertian AFTA, adalah negara terlebih yang memiliki arti penting karena letaknya yang strategis atau kekayaan alamnya, akan mempunyai kesempatan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan-tekanan dari negara besar bila mereka dalam pengelompokan.¹

¹ Skripsi tidak diterbitkan Ratnasari Hendrayani, “Strategi Ekonomi dan Politik Indonesia dalam Menghadapi Kerjasama AFTA”, 2002.

2. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN mau tidak mau harus ikut serta dalam kawasan perdagangan bebas ini. Kerjasama tersebut dimaksudkan dan bertujuan salah satunya yaitu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di semua negara anggota ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN memungkinkan semua produk dari para anggota ASEAN untuk beredar secara bebas di Indonesia dan produk Indonesia akan bersaing dengan produk-produk dari luar tersebut.
3. Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang memiliki letak geografis yang strategis, kaya akan sumber daya alam dan memiliki penduduk yang banyak. Sehingga Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi jika Indonesia mampu mengolah semua faktor yang dimiliki dengan baik. Dengan demikian Indonesia dapat memperbaiki perekonomiannya.

Hal-hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut karena relevansi di era perdagangan bebas saat ini sangat menarik untuk dikaji.

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengupas sebuah fenomena globalisasi dan regionalisasi yang berimplikasi pada perekonomian Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang AFTA dan perannya dalam memajukan perekonomian di negara-negara ASEAN

3. Mencoba memberikan gambaran yang obyektif mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam AFTA.
4. Untuk memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1992, di Singapura pada pertemuan puncak ke-4 negara-negara yang bergabung dalam ASEAN, dicetuskan keinginan untuk segera melaksanakan AFTA yang semula dijadwalkan pada tahun 2008, dipercepat menjadi tahun 2002. Inilah salah satu kenyataan globalisasi perekonomian dunia. Integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian regional/global seperti AFTA, APEC, WTO/GATT memang tidak bisa dihindari. Suka tidak suka, mau tidak mau, kenyataan integrasi perekonomian dunia ini memang harus dihadapi.

Inilah konsekuensi bagi perekonomian negara yang menganut paham pasar bebas. Paham yang menempatkan perekonomian suatu negara di tengah-tengah arus perdagangan dunia, tanpa negara itu bisa menghindarinya. Arus perdagangan dunia seperti ini mempunyai ciri: (1) kebebasan arus transaksi uang, barang, dan jasa (2) persamaan perlakuan dan kesempatan bagi seluruh pelaku pasar oleh seluruh negara peserta dan (3) berbasis pada teknologi informasi. Indonesia kini benar-benar telah

berada dalam arus perdagangan bebas, dan tidak mungkin lagi menarik langkah mundur.

Pada waktu perjanjian AFTA disetujui, ASEAN memiliki 6 anggota : Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam menjadi anggota pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja 1999. Keempat anggota baru tersebut memiliki peluang lebih longgar (dalam hal waktu) untuk melaksanakan AFTA.

The US-ASEAN Business Council sudah lama memberikan dukungan bagi terciptanya integrasi ekonomi regional dengan populasi lebih dari 500 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara. ASEAN diperkirakan akan lebih banyak menarik minat untuk investasi langsung dalam skala besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Awal tahun 2005, ekspor Indonesia pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 4,84 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2004, yakni dari 6,45 miliar dollar AS menjadi 6,13 miliar dollar AS. Meski demikian, nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 21,63 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor selama bulan Januari 2004. Penurunan ekspor bulan Januari 2005 disebabkan oleh menurunnya ekspor non-minyak dan gas (migas) sebesar 4,13 persen, yakni dari 5,12 miliar dollar AS menjadi 4,91 miliar dollar AS. Kondisi yang sama terjadi pada ekspor migas yang menurun 7,56 persen dari 1,32 miliar dollar AS

menjadi 1,2 miliar dollar AS. Penurunan ekspor migas disebabkan menurunnya ekspor hasil minyak sebesar 33,83 persen menjadi 66,9 juta dollar AS dan turunnya ekspor gas alam sebesar 18,94 persen menjadi 620,6 juta dollar AS. Sementara ekspor minyak mentah justru naik sebesar 17,31 persen menjadi 536,1 juta dollar AS.

Meski menurun dibandingkan nilai ekspor Desember 2004, nilai ekspor Januari 2005 meningkat 21,63 persen dibandingkan bulan Januari 2004. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya ekspor nonmigas 27,79 persen dan ekspor migas 1,92 persen. Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh naiknya ekspor minyak mentah 14,16 persen, sementara ekspor hasil minyak dan ekspor gas alam menurun, masing-masing 30,75 persen dan 2,16 persen.

Data BPS menyebutkan, penurunan terbesar ekspor nonmigas bulan Januari 2005 terhadap bulan Desember 2004 terjadi pada produk lemak dan minyak nabati atau hewani, yakni senilai 187 juta dollar AS. Komoditas lain yang mengalami penurunan adalah bahan bakar mineral, khususnya batu bara, bijih, kerak, dan abu logam, kemudian produk karet dan barang dari karet, serta produk mesin-mesin atau pesawat mekanik. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada komoditas bubur kayu atau pulp, yakni dari 31,7 juta dollar AS pada Desember 2004 menjadi 116,3 juta dollar AS pada Januari 2005. Ekspor komoditas lain yang dilaporkan meningkat antara lain kertas atau karbon, barang-barang rajutan, dan pakaian jadi bukan rajutan.

Serikat sebesar 802,8 juta dollar AS, Jepang 637,2 juta dollar AS, dan Singapura 530,7 juta dollar AS. Peranan ekspor dengan tujuan ketiga negara itu tercatat telah menyumbang 40,14 persen dari seluruh nilai ekspor nonmigas Indonesia. Meski masih menjadi salah satu tujuan ekspor utama, nilai ekspor ke Jepang selama bulan Januari 2005 menurun sebesar 108,2 juta dollar AS dibandingkan ekspor Desember 2004. Penurunan ekspor terbesar juga terjadi untuk tujuan ekspor ke China, Malaysia, dan Taiwan.

Meski masih menjadi salah satu tujuan ekspor utama, nilai ekspor ke Jepang selama bulan Januari 2005 menurun sebesar 108,2 juta dollar AS dibandingkan ekspor Desember 2004. Penurunan ekspor terbesar juga terjadi untuk tujuan ekspor ke China, Malaysia, dan Taiwan. Selama tahun 2004, Jepang masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 7,58 miliar dollar AS atau menyumbang 14 persen dari nilai ekspor keseluruhan.

Nilai impor Indonesia pada bulan Januari 2005 mencapai 4,01 miliar dollar AS atau turun 16,67 persen dibandingkan impor pada bulan Desember 2004, yang mencapai 4,81 miliar dollar AS. Penurunan impor ini didorong oleh menurunnya impor nonmigas bulan Januari 2005 sebesar 18,17 persen atau mencapai 2,94 miliar dollar AS dibandingkan impor Desember 2004. Penurunan juga terjadi pada impor migas, yakni sebesar 12,26 persen atau menjadi 1,07 miliar dollar AS.

Meskipun menurun dibandingkan impor pada bulan Desember 2004, impor

Indonesia justru meningkat secara signifikan dibandingkan impor yang dilakukan selama Januari 2004. Kenaikan itu terjadi sebesar 19,87 persen, yakni dari sekitar 3,3 miliar dollar AS menjadi 4,01 miliar dollar. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 48,67 persen dan impor nonmigas sebesar 11,99 persen. Impor migas terjadi pada impor minyak mentah sebesar 141,8 juta dollar AS dan impor hasil minyak sebesar 209,5 juta dollar AS.²

Situasi ini belum termasuk kendala belum tertatanya sistem Administrasi (hukum, peraturan, dll), sistem Perpajakan dan sistem Moneter yang baik di Indonesia. Hal ini diperkirakan akan memperkecil manfaat perluasan pasar bagi pemain-pemain bisnis Indonesia di kawasan ekonomi ASEAN yang baru. Di masa datang, pasar Indonesia diramalkan akan menjadi sasaran empuk agresivitas pemain-pemain bisnis Malaysia, Thailand, Vietnam serta bisnis jasa keuangan di Singapura.³

D. POKOK PERMASALAHAN

Dengan memperhatikan kasus diatas, maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan yang akan digunakan untuk membahas penelitian untuk skripsi ini yaitu :

² KOMPAS, Rabu, 2 Maret 2005.

³ http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=1317&coid=2&cald=19
Copyright © 2002 Uni Sosial Demokrat

“Strategi apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini Deperindag agar Indonesia mampu bersaing di era perdagangan bebas AFTA?”

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengorientasikan pada teori yang dianggap sesuai untuk menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Konsep Kerjasama Internasional

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁴ Konsep ini merupakan “suatu alat komunikasi”/ bahasa dalam kegiatan pemikiran sehingga hal ini diabstrasikan dari kesan yang ditangkap melalui indera dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Selanjutnya konsep ini merupakan kesepakatan masyarakat penggunanya. Hubungan internasional merupakan abstraksi yang menggambarkan interaksi yang terjadi diantara aktor-aktor yang melampaui batas yuridiksi sebuah negara.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan dicerminkan dalam berbagai perkembangan Hubungan Internasional Modern.

“Hubungan internasional yang berdasarkan prinsi-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antarnegara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin baik dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan tersebut juga akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah tetapi juga melibatkan semua sektor masyarakat.”⁵

Dari pengertian diatas, berkaitan dengan kerjasama internasional yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang perekonomian yaitu dengan membentuk Asean Free Trade Area (AFTA). Pembentukan AFTA ini bertujuan untuk membuka pasar di antara negara-negara ASEAN yang diharapkan dapat saling menguntungkan dan dapat memajukan perekonomian negara-negara ASEAN terutama Indonesia. Dalam hal ini juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku industri dan perdagangan yang berada dibawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI.

Sedangkan menurut K.J. Holti mendefinisikan kerjasama internasional adalah :

⁵ Morgenthau, *Perserikatan Bangsa Bangsa. Hubungan Antara Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional*, New York, 1982, hal 86.

“sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua proses ini disebut dengan kerjasama.”⁶

Proses kerjasama itu tercipta dikarenakan saling membutuhkan. Sifat tersebut terjadi baik pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi sifat saling membutuhkan dan ketergantungan antarnegara terjadi pula pada kerjasama yang lebih spesifik yaitu kerjasama dibidang ekonomi yaitu dengan membentuk AFTA yang beranggotakan negara-negara ASEAN.

Keputusan pembentukan AFTA merupakan sesuatu yang sangat tepat sekarang ini, terutama untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang sedang terseret arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia, dan juga untuk memberi “warna baru” kerjasama ekonomi ASEAN lebih rinci. Perkembangan terakhir dengan pembentukan Pasar Tunggal Eropa (PTE) dan North American Free Trade Agreement (NAFTA) sungguh mengancam dan mengkhawatirkan negara-negara ASEAN. Jika ASEAN tidak segera membentuk kesatuan ekonomi bersama, ditakutkan ASEAN makin tidak bisa bersaing.

⁶ K.J.Holti, *Politik Internasional Studi Analisis Jilid I*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 89

AFTA diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan dapat lebih meningkatkan daya tarik ASEAN. Dengan menciptakan pasar yang lebih besar diharapkan bahwa ASEAN akan menarik lebih banyak penanam modal asing dan modal dari negara-negara ASEAN sendiri.⁷ Bagi Indonesia AFTA bisa dijadikan latihan peningkatan daya saing sebelum mencapai persaingan pasar global. Kerjasama dibidang transportasi, komunikasi, perbankan dan keuangan pada tingkat regional ASEAN akan memudahkan pengembangan bisnis di pusat-pusat pertumbuhan.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan keseluruhan hendak nasional. Semua negara pada dasarnya mempunyai cita-cita nasional yang hendak dicapai dan ingin diperjuangkan. Di Indonesia, kepentingan nasional diwujudkan oleh kehendak anggota MPR yaitu tertuang dalam GBHN. Dalam GBHN telah ditegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajah dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.⁸

⁷ Raharjo Djambomo, *Sub Wilayah Ekonomi ASEAN dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN*, Jakarta : Proyek Kerjasama Antara Negara ASEAN. Sekretariat Deplu, 1995-1996.

Menurut Hans J. Morgenthau :

“Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan dan pengendalian ini bisa diciptakan melalui bentuk paksaan / kerjasama. Dalam konteks tersebut memuat arti minimum, inheren dan isi konsep tersebut ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan dimana suatu negara merumuskan politik luar negerinya. Adapun arti minimum inheren didalam konsep kepentingan nasional adalah melindungi identitas fisik, politik dan budaya (sejarah) dari negara / bangsa lain.”⁹

Berkaitan dengan hal itu konsep kepentingan nasional, tidak selalu mencari kekuatan atau power melainkan menterjemahkan power sebagai komunikasi dan kerjasama.¹⁰ Dari definisi diatas dapat diimplementasikan dalam kerjasama internasional untuk membuka peluang pasar demi memajukan perekonomian negara-negara ASEAN melalui AFTA. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan perekonomian masing-masing negara.

F. HIPOTESA

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas serta didukung dengan penggunaan teori yang dimana sebagai kerangka dasar berpikir dalam menganalisa

⁹ Morgenthau, dikutip dalam Coulombis dan Wolfe.

¹⁰ Dinar di M. Aruna, *Politik Luar Negeri Indonesia: Menjalani Kerjasama Selatan-Selatan*

permasalahan, maka penulis mempunyai hipotesa bahwa Deperindag RI membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merespon persetujuan-persetujuan yang ada dalam AFTA yang berbentuk peraturan perdagangan ekspor-impor yang sesuai dengan kepentingan nasional yang terdapat didalam GBHN.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan tulisan tentang regionalisasi AFTA hanya pada respon Deperindag RI terhadap persetujuan-persetujuan yang ada di AFTA dari segi ekspor dan impor, sejak tahun 2002 hingga tahun 2004.

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library search*) sehingga sifatnya sekunder. Dan juga ditambah dengan pengamatan melalui media cetak dan